

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemekaran Kabupaten Bener Meriah memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian ini. Melalui pemekaran, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mengelola pembangunan infrastruktur pendidikan. Pada tahun 2023 sarana pendidikan ditingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah mencapai kategori memenuhi (*surplus*) sesuai dengan kriteria SNI (03-1733-2004), dengan masing – masing tersedia 132 unit SD, dan 58 unit SMP. Akan tetapi pada tingkat SD terdapat dua Kecamatan yang masuk ke dalam kategori *defisit* yakni Kecamatan Bandar dan Kecamatan Bukit, sedangkan untuk sarana SMP telah mencukupi bahkan telah kebutuhan pendidikan diseluruh wilayah Kecamatan. Keberhasilan pemekaran daerah Kabupaten Bener Meriah juga tampak dari peningkatan jumlah sarana pendidikan pada tingkat SMP dalam kurun waktu terakhir yakni pada tahun 2019 hingga 2023, tercatat adanya penambahan 5 unit SD dan 8 unit SMP. Namun ketersediaan sarana ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), masih dalam kategori kekurangan (*defisit*), dengan hanya 22 unit tersedia, Hanya terdapat 4 dari 10 Kecamatan yang masuk ke dalam kategori *efisien* yakni Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, dan Kecamatan Syiah Utama. Berbeda dengan jenjang SD dan SMP, pemekaran daerah di Kabupaten Bener Meriah belum menunjukkan

dampak positif terhadap peningkatan sarana pendidikan tingkat SMA. Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun, terjadi penurunan jumlah sekolah dari 23 unit pada tahun 2019 menjadi 22 unit pada tahun 2023, hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan yang paling tampak yakni rendahnya jumlah peserta didik di beberapa wilayah.

2. Ketersediaan sarana yang mencukupi diseluruh kecamatan menjadi bukti nyata bagaimana pemekaran wilayah dapat mendorong distribusi sarana sosial yang merata dalam mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada tahun 2023 ketersediaan sarana sosial yakni sarana Kesehatan Rumah Sakit berjumlah 2 unit, Puskesmas 13 unit dan Puskesmas Pembantu 33 unit, sedangkan sarana Peribadatan Masjid 154 unit dan Gereja 0 unit. Sesuai dengan kriteria baku SNI (03-1733-2004) dan dengan perhitungan teori daya layan (Muta'ali, 2015), ketersediaan sarana kesehatan telah berada pada kategori memenuhi standar yang telah ditetapkan (*surplus*). Terdapat pengecualian pada sarana balai kesehatan/klinik, dimana pada tahun 2023 Kabupaten Bener Meriah hanya memiliki 1 klinik pratama, jika dihitung dengan kriteria baku, maka sarana balai kesehatan/klinik termasuk ke dalam kategori *defisit*. Selanjutnya terdapat 1 Kecamatan yang tidak memiliki sarana Puskesmas Pembantu yakni Kecamatan Bener Kelipah yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang relatif kecil, sehingga tidak memenuhi syarat untuk pembangunan puskesmas pembantu di wilayah tersebut. Sedangkan pada sarana peribadatan Masjid juga dikategorikan telah memenuhi (*surplus*), namun pada sarana Gereja belum tersedia (*defisit*) hal ini terjadi bukan tanpa

alasan mengingat mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten Bener Meriah beragama Islam sedangkan untuk umat Kristen hanya 114 penduduk atau sekitar 0,6% dari total populasi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam penyediaan sarana bagi umat Kristen untuk mendukung sikap toleransi antar umat beragama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Sebagai Kabupaten yang telah mekar selama kurang lebih 21 tahun, hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah dapat melakukan evaluasi terhadap ketersediaan sarana yang ada terutama pada sarana pendidikan dan sarana sosial. Hal ini berkaitan dengan terdapat beberapa sarana atau fasilitas yang belum sesuai dengan kriteria (kekurangan). Dalam hal ini besar harapan agar dapat dipertimbangkan sebagai acuan dalam penyediaan atau penambahan unit bangunan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diharapkan hendaknya dapat mengambil kebijakan dalam menyediakan atau menambah sarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tentunya dengan tetap mengacu pada kriteria yang telah berlaku. Langkah ini penting untuk memastikan distribusi fasilitas menjadi lebih merata diseluruh wilayah, termasuk daerah terpencil di wilayah Kabupaten Bener Meriah sehingga pelayanan dari fasilitas yang tersedia dapat dinikmati oleh masyarakat.